



Ijazah Ditahan karena Belum Lunas

**WAJIB
DIBERIKAN**

- Praktik menahan ijazah tidak diperbolehkan
- Apalagi berkaitan dengan biaya sekolah
- Sekolah tidak boleh mencampur aduk urusan pembiayaan dengan pemberian ijazah peserta didik.

**Siswa Tak Mampu Berhak
Dapat Keringanan Biaya Pendidikan**

JOGJA - Praktik penahanan ijazah oleh sekolah masih terjadi di Kota Jogja. Meskipun pemerintah melarangnya. Hal itulah yang membuat Heri Yanto pusing tujuh keliling. Bagaimana tidak, saat dia disibukkan mencari sekolah bagi anak kedua dan ketiganya yang akan masuk SMK dan SMP, warga Sindurejan RT 48/RW 10, Patangpuluhan, Wirobrajan, itu dipusingkan mengurus ijazah putra pertama dan keduanya yang masih ditahan pihak sekolah masing-masing.

↳ Baca Ijazah... Hal 7

**BUTUH
KERINGANAN:**
Heri Yanto menunjukkan surat keterangan tidak mampu dan rincian kekurangan biaya sekolah anaknya di SMP Muhammadiyah 5 Jogja.

- Ijazah wajib diberikan pada peserta didik setelah merampungkan tiap jenjang pendidikan.
- Ada mekanisme bantuan pendanaan dari Pemkot Jogja untuk warga Kota Jogja. Setelah melalui proses verifikasi oleh dinas sosial.

Sumber: Ditdik Kota Jogja
HERI PRATOMO/BICAR JOGJA

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Tak Ada Paksaan

Beli Seragam di Sekolah

■ IJAZAH...

Sambungan dari hal 1

"Maaf mas, susah ya cari saya. Ini *handphone* juga sudah jadul, dikareti, *saking mumete*," keluh Heri menyambut *Radar Jogja* di rumah kontraknya kemarin (14/7).

Rumah kontrakan Heri berada di pemukiman padat dekat Sungai Winanga. Heri mengibaratkan *handphone*-nya yang diikat karet gelang dengan kondisinya saat ini yang sedang bingung.

Dikatakan, ijazah putra pertamanya, Bima Ilham Firnando,

masih ditahan SMK 3 Kota Jogja. Sedangkan ijazah milik putra keduanya, Satria Nur Alam, belum diberikan oleh SMP Muhammadiyah 5 Jogja.

Menurutnya, kedua sekolah tersebut memiliki alasan senada, sehingga belum melepaskan ijazah

Bima dan Satria. Karena Heri belum melunasi biaya administrasi sekolah. "Padahal saya sudah melampirkan surat keterangan tidak mampu dan ada jaminan dari Dinas Pendidikan Kota Jogja. Tapi (ijazah) itu tetap belum diberikan," ungkapnya memelas.

Heri mengetahui ijazah Bima akan ditahan sebelum ujian nasional. Saat itu dirinya dipanggil pihak sekolah untuk menyelesaikan biaya administrasi. Supaya kartu ujian nasional bisa diterbitkan. Kendati demikian, Bima akhirnya tetap bisa mengikuti ujian meski urusan administrasi belum rampung. "Anak saya tetap dapat ikut ujian. Tapi sebelum lunas ijazah akan ditahan dulu," bebemnya.

Di SMK 3 Heri diminta menyelesaikan biaya administrasi sebesar Rp 3 juta. Sementara di SMP Muhammadiyah 5 Jogja tanggungan yang harus dilunasi Rp 8 juta. Untuk pelunasan di SMP Muhammadiyah 5 Jogja Heri mendapat bantuan keringanan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja sebesar Rp 3 juta. Bantuan tersebut bukan dalam bentuk uang tunai. Tapi surat yang ditujukan untuk kepala SMP Muhammadiyah 5 Jogja. "Kekurangan Rp 5 juta masih dicarikan pinjaman ke teman. Itu belum termasuk Rp 300 ribu untuk perpindahan siswa," jelas pria 45 tahun itu.

Heri terpaksa mengurus surat keterangan tidak mampu karena dirinya bukan lagi termasuk warga pemegang kartu menuju sejahtera (KMS). Tiga tahun lalu KMS miliknya dicabut. Salah satu penyebabnya karena dia pindah rumah dari Bangunrejo, Tegalrejo ke Sindurejan. Padahal Heri termasuk keluarga penerima program keluarga harapan (PKH) maupun program Indonesia Pintar (PIP).

Meski bukan pemegang KMS, anak ketiganya, Diah Ayu, diterima di SMPN 11 Jogja melalui jalur reguler. "Kebetulan nilainya tinggi 24," katanya. Diterimanya Diah di SMPN 11 Jogja memang sedikit bisa melegakan beban pikiran Heri.

Namun, saat ini dia masih harus berjuang menebus ijazah Satria dan Bima. Terlebih Satria telah diterima di SMKN 1 Kasihan. Bantul. Tak adanya ijazah SMP membuatnya mengalami kendala untuk daftar ulang. "Sementara pakai surat keterangan

lulus (SMP)," jelas Heri.

Belum lagi soal biaya. Heri harus menyediakan uang Rp 2,6 juta untuk daftar ulang di SMKN 1 Kasihan. "Sudah dibayar separo tapi belum dapat seragam," lanjutnya.

Sedangkan untuk menebus ijazah putera sulungnya, Heri masih terus mencari pinjaman orang lain. Saat ini Bima sedang mengikuti pelatihan di balai latihan kerja. "Nggak tahu juga, tanpa ijazah apa bisa untuk melamar kerja," ujarnya setengah bertanya.

Heri mengaku, pekerjaannya sehari-hari sebagai buruh harian tak cukup untuk menutup kebutuhan biaya sekolah anak-anaknya. Meskipun istrinya membantu cari penghasilan tambahan di kantin TVRI.

Kendati demikian, dia bertekad mengusahakan pendidikan yang terbaik bagi empat anaknya. "Kebetulan anak-anak punya semangat di sekolah yang tinggi," ucapnya.

Terpisah, Kepala Disdik Kota Jogja Edi Heri Suasana menegaskan, praktik menahan ijazah tidak diperbolehkan. Apalagi berkaitan dengan biaya sekolah "*Mboten pareng mas*," tulis Edi melalui layanan *WhatsApp*.

Sekretaris Disdik Budi Santosa Asrori menambahkan, sekolah tidak boleh mencampur aduk urusan pembiayaan sekolah dengan pemberian ijazah peserta didik. Ijazah wajib diberikan pada peserta didik setelah merampungkan tiap jenjang pendidikan. Untuk warga Kota Jogja, lanjut dia, sudah ada mekanisme bantuan pendanaan dari pemkot. Itu setelah melalui proses verifikasi oleh dinas sosial. "Kalau sudah ada bantuan pembiayaan dari Pemkot Jogja ya dianggap selesai," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DJI Kadarmantha Baskara Aji mengimbau seluruh siswa sekolah tak mengkhawatirkan biaya pendidikan. Alasannya, tiap sekolah bisa mengusulkan bantuan beasiswa bagi siswa-siswi tidak mampu melalui Disdikpora. Beasiswa tersebut bisa berbentuk ban-

tuhan atau sumbangan biaya sekolah. "Kalau memang ada (siswa tidak mampu) boleh ditinggalkan atau justru dibebaskan (dari biaya)," tegasnya.

Hal itu juga sudah disebutkan saat pendaftaran peserta didik baru (PPDB). Keluarga tidak mampu bisa mendapat keringanan biaya sekolah. Atau membayar tidak sesuai dengan jumlah biaya yang ditentukan. Bahkan sangat mungkin dibebaskan dari seluruh biaya kalau memang dari segi kemampuan tidak ada.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut, siswa terkait harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dari dinas sosial. "Begitu siswa menyerahkan surat keterangan harus segera diproses oleh pihak sekolah," kata Aji.

Mengenai seragam, diserahkan kepada orang tua siswa. Aji menegaskan, tak ada paksaan bagi siswa untuk membeli seragam di sekolah.

Kepala Sekolah SMKN 3 Jogja Bujang Sabri membantah sekolah yang dipimpinnya melakukan penahanan ijazah. Bujang menyatakan tidak pernah menahan ijazah siswa dengan alasan apa pun, selama orang tua/wali murid melakukan komunikasi.

Jika dikatakan alasan administrasi sekolah, kata Bujang, bisa dirembug bersama dan ada solusinya. "Pertanyaannya, orang tua siswa itu sudah ketemu saya belum? Tidak ada sejarahnya SMKN 3 menahan ijazah. Kalau pun kesulitan biaya bisa ngomong langsung, saya berikan ijazahnya," tegas Bujang.

Lebih lanjut dikatakan, saat ini memang belum ada ijazah untuk lulusan 2017 yang diberikan. Alasannya, saat ini masih dalam tahap cap tiga jari. "Sampai sekarang belum ada ijazah yang saya tanda rangani. *Kok* bisa dikatakan menahan ijazah," sesalnya.

Sementara Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 5 Jogja Sulamiah belum bisa dikonfirmasi terkait kasus penahanan ijazah salah seorang siswanya. Telepon, SMS maupun *WhatsApp* yang dikirim *Radar Jogja* tadi malam belum dibalas. (pra/dya/yog/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005